



**“Sesuatu yang Tak Pernah Terjadi”
Membayangkan Kemenangan Nusantara Melawan Kolonialisme**

Haldi Patra

Magister Sejarah Universitas Andalas

E-mail : hpatra69@gmail.com

Abstrak: Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan, para bapak bangsa Indonesia sepakat bahwa wilayah kedaulatan republik yang akan dibentuk ini adalah bekas wilayah Hindia-Belanda. Alasan atas integrasi ini adalah karena mereka merasa “senasib sepenanggungan”, karena sama-sama pernah dikalahkan dan dijajah oleh Belanda. Tulisan mengenai *counterfactual* ini, akan mengangkat permasalahan mengenai pemikiran nasionalisme sebagai sesuatu yang bersifat *absolutely splendid ancestors* (warisan dari nenek moyang kita yang cemerlang). Tujuan penulisan ini untuk mengelaborasi pemikiran nasionalisme bangsa Indonesia. Metode yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan nasib di masa lalu nasionalisme Indonesia tidak akan tertanam dalam diri bangsa-bangsa itu. Ketiadaan rasa senasib itu membuat mereka tidak merasa perlu untuk berintegrasi dengan Indonesia. Nasionalisme yang muncul pada dalam diri mereka adalah nasional suku bangsa mereka masing-masing.

Kata kunci: Nasionalisme, *Counterfactual*, Perlawanan Penduduk Lokal, Kolonialisme

***“Something That Never Happened”
Imagine Triumph of Nusantara Against Colonialism***

Abstract: When Indonesian independence was proclaimed, the fathers of the Indonesian people agreed that the territory of the republic that was to be formed was the former Dutch East Indies. The reason for this integration is because they feel "the same fate", because both have been defeated and colonized by the Dutch. This article on counterfactual will raise the issue of nationalism thinking as something that is *absolutely splendid ancestors* (the legacy of our brilliant ancestors). The purpose of this paper is to elaborate the thinking of Indonesian nationalism. The method used is the literature by gathering research materials in the form of books and relevant scientific articles. The results showed that the differences in the fate of the past Indonesian nationalism would not be embedded in the nations. The lack of a sense of shared destiny made them not feel the need to integrate with Indonesia. Nationalism that arises in them is the nationality of their respective tribes.

Keywords : Nationalism, *Counterfactual*, Resistances, Colonialism

Pendahuluan

Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, terdapat ratusan kerajaan-kerajaan lokal yang merdeka. Jadi sudah terdapat banyak negara-negara yang dikemukakan oleh orang-orang pribumi. Meski demikian nama Indonesia belum dikenal. Pada masa itu hanya ada kerajaan-kerajaan seperti; Gowa-Tallo, Banten, Jambi, Palembang, Siak, Deli, Aceh, Malaka, Demak, Mataram dan lain-lain. Demikianlah, semangat nasionalisme sebagai manifestasi kesadaran bernegara tidak sama dengan nasionalisme yang tumbuh dalam dada para pejuang kemerdekaan selama zaman penjajahan Belanda (Muljana, 2012).

Pada akhir abad ke 19, praktis hanya Thailand saja entitas politik lokal Asia Tenggara yang masih merdeka. Sedangkan daerah Asia Tenggara lainnya telah menjadi jajahan bangsa Barat. Inggris menduduki wilayah yang sekarang menjadi negara Myanmar, Malaysia, Singapura dan Brunei modern. Perancis berkuasa di Indochina, Philipina dijajah oleh Spanyol –yang kemudian berpindah kepada Amerika Serikat. Sedangkan Portugis – yang merupakan salah satu pembuka jalan ke Asia Tenggara, hanya mendapatkan Timor Timur. Belanda menyelesaikan pasifikasinya pada abad 20 di kepulauan Nusantara dan mengintegrasikannya dalam *Pax Neerlandica*. sistem hukum dan administrasi pemerintahan yang berlaku di semua wilayah Hindia-Belanda berfungsi menyatukan Indonesia di bawah rezim kolonial. Meskipun harus diakui bahwa aturan hukum kolonial itu merupakan instrumen kekuasaan untuk melindungi kepentingan kekuasaan kolonial itu sendiri dan bukan melindungi semua warga (Mestika Zed, 2017).

Bisa dikatakan bahwa peta Asia Tenggara hari ini diciptakan oleh batas-batas kolonialisme Barat. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal pada hari ini yang terhampar dari Sabang sampai Merauke adalah bekas Hindia-Belanda. Padahal sebelumnya, di wilayah yang bernama Indonesia sekarang ini terdapat ratusan kerajaan-kerajaan, berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa. Meskipun berasal dari berbagai suku bangsa yang berbeda, dengan argumentasi senasib sepenanggungan itu, bangsa-bangsa tersebut sepakat untuk mendirikan suatu komunitas bayangan mana setiap anggotanya memiliki latar belakang budaya, bahasa dan bangsa yang berbeda namun menyerahkan nasib mereka dalam proyek bersama (*common project*) nasionalisme.

Ben Anderson mengusulkan definisi tentang bangsa atau nasion: ia adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai suatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, dan tidak bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula mendengar tentang mereka. Namun *toh* di

benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan (Anderson, 2001). Sedangkan menurut Ernest Renan, ia menolak bahwa negara-bangsa dibentuk atas kesamaan ras. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki ras yang sama di dunia ini. Ia juga menolak penciptaan bangsa berdasarkan kesamaan bahasa. Berdasarkan berbagai alasan, Renan mengemukakan penciptaan sebuah bangsa adalah sebuah jiwa, sebuah prinsip spiritual. Satu sisi tentang masa lalu, sisi lain tentang masa depan. Maka keinginan orang-orang dalam suatu kelompok itu didasarkan pada permasalahan yang sama yang didasari pada pengalaman sejarah. Tesis ini menekankan pada kelahiran republik Indonesia yang secara sejarah merupakan sisa-sisa wilayah kolonial Belanda dan setelah kedatangan Jepang, mengalami penderitaan yang sama. Karena mereka berbagi pengalaman yang sama, bahkan di sebuah daerah yang dihuni berbagai macam kelompok etnik, agama, bahasa dan budaya, mereka bisa menciptakan bangsa karena kemauan untuk hidup bersama. Keinginan bersama ini mengekspresikan dalam perjuangan melawan kolonialisme dan semua usaha yang mencoba untuk menggagalkan pembentukan sebuah negara-bangsa, yaitu Republik Indonesia (Nasution, 2018).

Fakta-fakta sejarah tersebut biasa dipakai untuk mempertegas nasionalisme Indonesia. *Raison d'etre* mengapa adanya Indonesia. NKRI adalah harga mati! Namun kemudian Budiman Sudjatmiko menawarkan suatu istilah baru, yaitu “NKRI adalah modal awal!” Tetapi bagaimana jika, uraian tersebut kita balik? Tradisi historiografi Indonesia juga tidak menyadari bahwa sesuatu “yang tidak terjadi” dalam suatu kurun waktu tertentu juga adalah bagian dari proses sejarah. Selain itu artikel mencoba untuk menggunakan konsep *counterfactual*. Ketidakhadiran sesuatu di dalam teks dokumentasi tidak pernah dipahami sebagai hal yang menyejarah (Purwanto, 2001). Wacana tentang spekulasi tentang apa yang tidak terjadi, atau apa yang seharusnya terjadi untuk memahami secara menyeluruh tentang apa yang terjadi (Black & MacRaid, 2000). Kekuatan dari *counterfactual* itu terdiri dari dua aspek; pertama, pada pengetahuan kita tentang apa yang tidak terjadi itu adalah benar karena dengan mudah telah terjadi, kedua, dengan mengemukakan pertanyaan “bagaimana seandainya” (*what if*) kita bisa menggambarkan apa yang telah terjadi (Black & MacRaid, 2000).

Berdasarkan dari uraian diatas, bagaimana seandainya salah satu atau beberapa bangsa itu berhasil mengalahkan Belanda dan tetap menjadi sebagai bangsa yang merdeka? Maka, ketika proklamasi dibacakan oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, apakah bangsa tersebut akan secara sukarela menyatakan integrasi dengan republik baru itu?

Tinjauan Pustaka

Dalam bagian ini akan didiskusikan beberapa tulisan-tulisan terdahulu mengenai nasionalisme Indonesia. Pertama (Samin, 2015), Pada masa modern ini, Sumatera dan semenanjung Malaysia terpisah dalam dua negara-bangsa yang berbeda. Namun, dua kawasan ini adalah pusat dari dunia Melayu. Antara kerajaan Melayu yang berada di Sumatera dan di semenanjung telah menjalin hubungan semenjak zaman Hindu-Buddha.

Kedua, Ben Anderson (Anderson, 1999) dengan isi ceramahnya yang kemudian dimuat dalam jurnal "Indonesia" berjudul Indonesian "*Nationalism today and in the Future*". Dalam diskusinya Ben Anderson menyatakan nasionalisme Indonesia adalah sesuatu yang baru. Nasionalisme adalah sebuah proyek bersama (*common project*) dimana seluruh anggotanya merasa memiliki nasib yang sama dan berusaha mewujudkan mimpi dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, Indonesia justru berlaku tidak adil terhadap seluruh anggota kelompok. Mereka tidak pernah diundang dalam proyek bersama ini. Maka hari ini, Nasionalisme Indonesia masih berhadapan dengan jalan yang terjal dan seluruh "anggota" Indonesia harus diundang kembali dalam proyek ini.

Ketiga, sebuah artikel dari Nasution (Nasution, 2018), yang memberikan analisis mengenai proses panjang pembentukan nasionalisme Indonesia, dimulai dari Kolonialisme Hindia-Belanda ke Era Orde Baru. Formasi negara-bangsa Indonesia lahir melalui proses panjang yang dimulai dari pengenalan pendidikan terhadap orang-orang Indonesia. Munculnya golongan terpelajar hasil pendidikan Barat adalah munculnya organisasi-organisasi yang menuntut kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, ditanamkan perasaan anti-barat dan Jepang adalah saudara tua Asia dalam rangka mewujudkan Asia Timur Raya. Pada masa Sukarno, konstelasi politik Indonesia terbagi dalam bermacam ideologi sebagai imbas dari NASAKOM (Nasionalis, Agamis, dan Komunis). Pada masa Orde Baru Soeharto, semangat anti-komunisme bergelora. Terjadi sakralisasi terhadap Pancasila. Seluruh partai politik, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya harus menganut ideologi Pancasila.

Keempat, Singgih Tri Sulistyono (Sulistyono, 2018). Artikel ini berusaha untuk mendiskusikan mengenai pertanyaan masih pentingkah nasionalisme? Indonesia masih membutuhkan nasionalisme. Negara-negara bekas kolonial yang muncul setelah Perang Dunia II, mencoba untuk menerapkan pasar bebas. Namun, negara justru menjadi tumbal atas akibat yang ditimbulkan oleh pasar bebas tersebut. Pada tataran ideal, negara seharusnya menjadi pelindung warga negara yang tidak beruntung, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kelima Yenny Narny (Narny, 2011), Rasa untuk saling berbagi pada masyarakat Indonesia telah dimulai semenjak abad ke-20. Institusi modern pendidikan dan media berperan dalam menyebarkan komunitas terbayang bernama Indonesia. Rasa persatuan ini semakin jelas ketika masa pendudukan Jepang. Jepang menawarkan kesempatan lebih untuk mengembangkan nasionalisme. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamakan, sifat dari persatuan Indonesia masih merupakan sesuatu yang rumit. Meskipun begitu, masyarakat Indonesia masih berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat terbayang itu. Namun, rasa keindonesiaan itu sering dilukai oleh operasi militer Indonesia. Melalui militer yang memainkan perannya dalam mempertahankan integritas teritorial Indonesia dalam bidang ekonomi, gangguan politik dan eksploitasi yang mengkomodifikasi untuk mengancam rasa ke-indonesiaan itu. Kebrutalan militer dan eksploitasi secara serius telah memperlemah identitas nasional dan mungkin akan membawa Indonesia kepada fragmentasi.

Metode Penelitian

Artikel menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hampir semua bahan bacaan kepustakaan (buku, artikel atau esai) dikelompokkan sebagai sumber sekunder atau sumber tangan kedua. Pada umumnya, buku-buku bacaan dalam pelbagai bidang merupakan *reservoir* informasi faktual uraian opini interpretasi (teori) dari penulisnya (Mestika Zed, 2004). Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah; mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan; membaca bahan kepustakaan; membuat catatan penelitian untuk menarik kesimpulan dari informasi yang didapat dari bahan bacaan; mengolah bahan bacaan yang kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian (Mestika Zed, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Peta dunia pada abad XV bagi orang-orang Eropa hanya menyebutkan Benua Asia dan Afrika. Amerika dan Australia masih belum ditemukan oleh mereka. Salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan oleh orang Eropa adalah rempah-rempah. Rempah-rempah itu dihasilkan di Maluku, dan orang-orang Eropa pada saat itu tidak mengetahui terlalu banyak tentang itu. Barang-barang yang dibutuhkan oleh orang Eropa didistribusikan dari Nusantara ke India menuju Konstantinopel dan berakhir di Lautan Tengah (Mediterrania). Kejatuhan Konstantinopel pada 1453 membuat Eropa terpaksa mencari langsung rempah-rempah itu ke daerah asalnya. Dengan modal kemajuan dalam bidang perkapalan dan astronomi, Spanyol dan Portugis memulai penjelajahan samudera. Jadi, kedatangan Bangsa

Portugis sebagai orang Peranggi tidak dapat dipandang terlepas dari konteks perkembangan sistem dunia yang semakin meluas akibat ekspansi Barat sejak akhir abad ke-15 (Kartodirjo, 2014).

Portugis menaklukan Goa (India) pada tahun 1510 dan menjadikannya pangkalan tetap. Pada 1511, Malaka ditaklukan dan mereka menemukan bahwa kota itu hanyalah bandar yang ramai. Apa yang mereka cari dihasilkan lebih jauh ke Timur. Untuk bisa memonopoli rempah-rempah, mereka harus bisa mencapai dimana rempah-rempah itu diproduksi. Akhirnya, Portugis sampai ke Maluku. Namun, kedatangan mereka disambut dengan perlawanan masyarakat lokal. Portugis berhasil menduduki beberapa wilayah di Kepulauan Maluku, meskipun kadang mereka berhasil diusir. Meski begitu, pengaruh Portugis tetap tertancap di kawasan itu sampai Belanda menggantikan kedudukan mereka. Proses kedatangan bangsa-bangsa Barat itu ternyata tidak bisa pula dilihat dalam kaca mata hitam putih. Hubungan antara raja-raja Nusantara dengan bangsa Portugis ditandai pada umumnya oleh sikap bermusuhan, meskipun ada faktor-faktor yang menyebabkan hubungan persahabatan, antara lain: (a) aliansi dengan raja-raja yang belum masuk Islam, seperti Sunda (1522) dan Raja Panarukan serta Raja Minangkabau; (b) dalam perebutan hegemoni-hegemoni di antara kerajaan-kerajaan Melayu salah satu pihak yang mencari hubungan dengan bangsa Portugis; (c) kedatangan bangsa barat lainnya juga mendorong hubungan bersahabat dengan bangsa Portugis (Kartodirjo, 2014). Orang-orang Belanda melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh bangsa Portugis: mereka mendirikan tempat berpijak di Jawa. Inilah yang akan membuat keterlibatan mereka berbeda secara fundamental dengan Portugis, dan yang akhirnya menyebabkan Belanda menjadi suatu kekuatan penjajah yang berpangkalan-darat di Jawa (Ricklefs, 2008).

Meskipun telah menguasai Malaka pada 1511, butuh ratusan tahun bagi bangsa Barat untuk bisa menancapkan kolonialisme dan imperialismenya di Nusantara. Hal ini dimulai dengan munculnya VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) sebagai kekuatan baru bangsa Barat dan sekaligus perpanjangan tangan kerajaan Belanda di Hindia Timur 1602. Dalam diskusi-diskusi sejarah, tahun inilah yang menjadi penanda atas permulaan penjajahan Belanda di Indonesia. Selama masa VOC terdapat banyak kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat. Bahkan sampai awal abad ke-20 masih terdapat kekuasaan lokal yang belum mampu ditembus dan dianeksasi Belanda (Ressink, 2012). Selain itu penting juga untuk diingat bahwa, pada kerajaan-kerajaan lokal Nusantara terdapat persaingan antara masing-masing dari mereka. Misalnya, Aceh sering mengirim armadanya ke

semanjung Melayu. Rivalitas antara Banten dan Mataram berlangsung untuk waktu yang lama. Pada saat bersamaan Mataram juga merasa perlu untuk memerangi kerajaan Blambangan yang masih kafir. Bangsa-bangsa Barat melihat ini sebagai suatu keuntungan dan menjalankan politik adu domba (*divide et impera*). Dengan hanya mengadu domba Kesultanan Banten dengan Mataram, Belanda mampu mempertahankan kedudukannya di Batavia. Memang, karena kerajaan-kerajaan besar di Jawa terpecah belah dan saling bermusuhan maka orang Belanda, dengan mengadu domba satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, dapat menguasai pulau ini seluruhnya (Kahin, 1995).

Perlawanan penduduk lokal melawan bangsa-bangsa Barat telah terjadi semenjak kedatangan mereka. Puluhan suku bangsa dengan berbagai entitas politik melawan, berperang dan kalah dengan Belanda. Spanyol dan Portugis mendapat perlawanan keras dari kerajaan Ternate-Tidore. Malaka ditaklukan pada 1511. Segera setelah menaklukan Malaka, Portugis bergerak untuk menuju daerah penghasil rempah-rempah, yaitu di Maluku. V.O.C. menghadapi peperangan berlarut-larut melawan Mataram. Batavia berkali-kali dikepung oleh tentara Mataram, meskipun akhirnya mereka berhasil memenangkan peperangan dan memecah Mataram menjadi dua pada perjanjian Giyanti (1755). Pada masa Hindia-Belanda, Minangkabau, berhasil memaksa Belanda melaksanakan perang dua ronde. Hal ini terjadi karena Belanda menolak untuk membuka dua front peperangan, karena pada saat yang bersamaan Perang Jawa meletus secara dahsyat. Perang Jawa ini menjadi salah satu perang kolonial terbesar yang dihadapi Belanda di Hindia. Perang ini menguras kas negara dan hampir membuat negara kesulitan ekonomi.

Mari kita melihat motif-motif dari perlawanan-perlawanan tersebut. Minangkabau abad ke 19, gerakan Wahabiah dengan puritaismenya tengah melanda daerah itu. Gerakan itu bertujuan membersihkan kehidupan agama Islam dari pengaruh-pengaruh kebudayaan setempat yang dianggap menyalahi ajaran agama Islam yang ortodoks. Diberantasnya perjudian, adu ayam, pesta-pesta dengan hiburan yang dianggap merusak kehidupan beragama (Kartodirjo, 2014). Kelompok pembaharuan agama diwakili oleh kaum Paderi dan kelompok yang ingin mempertahankan kehidupan tradisional itu adalah kaum Adat. Dua kelompok inilah yang saling bertempur untuk merebut dominasi di Minangkabau.

Belanda melihat konflik itu bukan hanya permasalahan agama, namun mengarah pada perlawanan terhadap penetrasi kolonial, sebagai ancaman terhadap kemerdekaan mereka. Belanda memandang kaum Padri menimbulkan suatu anarki, maka ada alasan untuk menjalankan pasifikasinya; yang jelas ialah bahwa gerakan menjalankan ekspansi ke

jurusan Mandailing, tanah Batak dan Riau sehingga “perang dalam” (*internal war*) berkobar; maka timbul situasi yang banyak mengakibatkan penderitaan (Dobbin, 2008). Bagi penguasa kolonial, konflik dan perpecahan memberi dalih untuk menjalankan intervensinya dan menanamkan pengaruhnya (Kartodirjo, 2014). Pada perkembangan selanjutnya, terjadi persatuan antara kaum adat dan kaum Paderi. Ketika di akhir karier militernya, Tuanku Imam Bondjol sebagai pemimpin gerakan ini menjauhkan diri dari wahabisme dan kekerasan yang membuat kehancuran pada kelompok yang bertikai (Paderi dan Adat), mengubah sebuah perang saudara ini menjadi perang melawan agresi Belanda (Hadler, 2008). Perang Diponegoro yang merupakan pergolakan terbesar yang terakhir dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Sampai selesainya perang tersebut yang gugur ada kurang lebih 200.000 orang, sedang yang mengalami penderitaan berjumlah sepertiga dari penduduk Jawa pada waktu itu, kurang lebih 2.000.000 orang (Kartodirjo, 2014). Kesengsaraan yang dialami masyarakat Jawa dengan begitu banyaknya pajak-pajak yang mesti mereka bayar, pertikaian politik pada kalangan bangsawan dan intervensi pemerintah kolonial terhadap permasalahan istana menjadi sebab umum pecahnya perang ini. Sedangkan provokasi yang dilakukan Belanda seperti merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan membongkar makam keramat menjadi sebab khusus.

Belanda mampu mengambil momentum disuatu waktu, kemudian momentum beralih ke pihak Diponegoro. Kemajuan yang tidak berarti serta banyak korban yang berjatuh, membuat Belanda akhirnya mengerahkan bala bantuan langsung dari Negeri Belanda sebanyak sekitar 3.000 orang (Kartodirjo, 2014). Strategi *Benteng stelsel* yaitu menyebarkan benteng-benteng untuk mendesak kekuatan Diponegoro terbukti sukses dan memaksa satu persatu pemimpin Diponegoro menyerah. Puncaknya, Diponegoro ditipu, ketika akan melaksanakan perundingan pada 28 Maret 1830, Belanda menangkap pangeran dan membuangnya ke Manado. Selanjutnya, Aceh Darussalam. Kerajaan ini pernah begitu mendominasi pada abad ke 17, namun kehilangan pengaruhnya pada abad ke 19. Namun, Aceh masih mendapat jaminan kemerdekaannya berdasarkan Traktat London pada 1824 (Kartodirjo, 2014). Namun, tampaknya meskipun Merdeka, nasib kesultanan ini akhirnya berada di tangan bangsa lain. Hitung-hitungan para kolonialis yang dengan sesuka hatinya membagi-bagi dunia berdasarkan kemauan mereka pada akhirnya membawa Aceh ke dalam kehancuran. Belanda dan Inggris bersepakat dalam Traktat Sumatera pada 2 November

1871. Belanda mendapatkan kebebasan memperluas kekuasaannya di Aceh sedang Inggris mendapat kebebasan berdagang di daerah Siak (Kartodirjo, 2014).

Aceh berhasil ditaklukan, namun perlawanan tidak berhenti. Belanda terlibat peperangan berlarut-larut hingga memasuki abad ke 20. Di sinilah muncul tokoh bernama Snouck Horgroenje yang melakukan penelitian mendalam di Aceh dan memberikan saran-saran yang sangat berguna sekali dalam penaklukan Aceh. Hasil penelitiannya merekomendasikan kepada Belanda untuk menanamkan perpecahan bagi rakyat Aceh. Caranya adalah memisahkan pejuang Aceh dari basis mereka di daerah pedalaman dan dengan memperkuat kekuasaan para bangsawan di Aceh (Vickers, 2011). Aceh akhirnya berhasil dikalahkan dan menjadi salah satu daerah terakhir yang mengalami pasifikasi Hindia-Belanda. Meskipun telah ditaklukan, kebencian terhadap Belanda masih tertanam dalam masyarakat Aceh. Hal ini senantiasa ditanamkan oleh para ulama yang memberikan pelajaran membenci orang kafir yang tetap menjadi ciri khas pelajaran agama di Aceh. Hanya pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Belanda mulai dapat diterima di bagian-bagian lain dari Indonesia (Reid, 2005).

Pada tahun 1909, Belanda telah berhasil mendirikan wilayah yang terintegrasi. Keberhasilan ini ditambah dengan pengambilalihan Papua Barat pada 1920-an. Kebanyakan wilayah Hindia-Belanda itu memang direbut dengan penggunaan kekuatan militer yang memakan banyak biaya dan mengorbankan ribuan orang, baik dari orang Belanda sendiri maupun penduduk lokal. Usaha penaklukan yang memakan waktu ratusan tahun itu pun akhirnya menuntut “balik modal” karena bagaimanapun, tujuan bangsa-bangsa Barat melakukan Imperialisme-kolonialisme pada akhirnya memang adalah faktor ekonomi. Sistem tanam paksa kemudian dilaksanakan untuk mengisi kekosongan kas Belanda. Petani wajib menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman yang ditentukan oleh pemerintah. Namun pada pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan yang merugikan petani. Maka hal *culture stelsel* yang berarti sistem pertanian (*cultivation system*) kemudian diterjemahkan menjadi tanam paksa dalam bahasa Indonesia.

Pelaksanaan sistem tanam paksa, dari kacamata Belanda dapat diukur dari kenyataan bahwa menjelang 1877, sistem ini berhasil melunasi hutang VOC yang sebesar 36.500.000 gulden dan menambah kas negeri Belanda sebesar 664.500.000 gulden. Dari jumlah ini, 236.000.000 gulden dipakai untuk mengurangi hutang-hutang 113.000.000 gulden untuk menurunkan pajak yang 153.000.000 untuk membangun jawatan kereta api, dan 146.000.000 gulden untuk memperbaiki benteng-benteng (Kahin 1995). Namun dari

kacamata penduduk, sistem ini membuat kemelaratan. Bencana kelaparan terjadi karena petani tidak mampu untuk membeli pangan dan distribusi bahan pangan yang sulit. Sebagai akibat dari serangkaian bencana kelaparan antara tahun 1843 dan 1848, penduduk sebuah kabupaten merosot dari 336.000 orang menjadi 120.000 dan di kabupaten lain, dari 89.000 menjadi 9.000 orang (Kahin, 1995).

Belanda datang dan menaklukan satu persatu daerah-daerah tersebut. Mereka membuat struktur baru dalam masyarakat. Pemerintahan menggunakan elit-elit lokal seperti Bupati, kerajaan lokal, *uleebalang*, dan penghulu untuk mengeksploitasi masyarakat Indonesia (Narny, 2011). Uraian menarik dipaparkan oleh George Kahin bahwa sebenarnya masyarakat Jawa sebelum kedatangan Belanda adalah masyarakat yang tidak pernah diperintah secara otoriter. Namun hal itu berubah ketika kebijakan Belanda yang memberikan kekuasaan lebih terhadap elit pribumi untuk menekan biaya operasional. Sistem pemerintah tidak langsung ini selanjutnya menjadi legitimasi elit untuk ikut mengeksploitasi masyarakat (lihat Kahin, 1995). Rasa kebangsaan yang muncul dalam masyarakat Indonesia dipicu oleh formasi masyarakat kolonial yang bersifat rasial. Seperti diketahui bahwa periode munculnya pergerakan nasional bersamaan dengan puncak perkembangan masyarakat kolonial yang merupakan produk dari kolonialisme Belanda di Indonesia (Sulistiyono, 2018).

Warisan kolonial lainnya adalah pendidikan, pemerintah Hindia-Belanda menggalakan politik etis, sebuah politik balas budi terhadap bangsa Hindia atas kontribusinya dalam kemajuan Negeri Belanda. Terdapat tiga poin utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, yaitu; imigrasi, irigasi dan edukasi. Pendidikan barangkali adalah hasil yang sangat penting sebagai suatu yang diwariskan oleh pemerintah Kolonial. Sangat ironis karena pendidikan modern yang dijadikan oleh Belanda dalam memerangi Pan-Islamisme, justru berkembang ke dalam salah satu kekuatan potensial untuk mengalahkan rezim itu (Kahin 1995, 58). Bisa dilihat dari daftar tokoh-tokoh bangsa semenjak zaman pergerakan sampai awal Indonesia adalah mereka yang mengenyam pendidikan Barat. Elit-elit nasional Indonesia yang muncul pada permulaannya sebagian besar adalah mereka yang golongan terdidik pendidikan Barat ini. Mereka inilah yang kemudian meletakkan sistem bernegara modern Indonesia. Melalui pendidikan ini, memunculkan pemikiran tentang asosiasi politik, yang berarti sebuah ide untuk membangun kooperasi antara orang Indonesia dan Belanda. Ide ini berdasar pada pemikiran bagaimana orang Indonesia dan Belanda meninggalkan segala hal yang menjadi pembatas, termasuk kemungkinan untuk menghilangkan semua bentuk

diskriminasi ras. Meskipun begitu terdapat beberapa kalangan dari Belanda yang mengkritisi pemikiran ini dan bagaimanapun persamaan ras tidak pernah diimplementasikan secara sempurna (Nasution, 2018). Bagaimanapun terdapat stratifikasi sosial terhadap penduduk di Hindia-Belanda. Orang Eropa berada pada tingkat teratas, kemudian diikuti oleh Indo, Timur Asing (Arab dan Tionghoa) sedangkan penduduk bumiputra berada pada dasar paling bawah stratifikasi ini.

Memang, pada pelaksanaannya terdapat tujuan lain dari pelaksanaan kebijakan pendidikan ini, pemerintah kolonial berusaha untuk mencetak tenaga ahli dari penduduk lokal yang dapat dibayar murah. Sekolah-sekolah di bangun di seantero Hindia-Belanda. Beberapa yang cukup beruntung mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi di Belanda. Persinggungan dengan ilmu pengetahuan Eropa pada tahap berikutnya memberikan semangat baru dalam perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Semenjak pergantian abad ke-20, perlawanan bersenjata tidak lagi menjadi pola perlawanan yang menarik untuk dilakukan –meski terdapat beberapa peristiwa pemberontakan. Politik dan menggunakan organisasi menjadi pola umum pada masa itu. Maka lahirnya tak terhitung jumlah organisasi-organisasi dengan berbagai latar belakang dan ideologinya.

Menurut Ben Anderson, Pangeran Diponegoro, dalam memoarnya mengatakan, tujuan politisnya atas perlawanan terhadap kolonialisme Belanda adalah untuk menaklukan Jawa (Anderson, 1999). Begitu juga dengan Perang Paderi, motif awalnya adalah untuk menyebarkan Wahabisme di Minangkabau. Aceh juga barangkali memiliki motif yang berbeda. Mereka adalah sebuah kesultanan yang berdaulat sebelum Belanda datang dan mencabik-cabik kerajaan itu. Konsep “Indonesia” barangkali sangat asing bagi mereka. Memang konsep nasionalisme adalah suatu hal yang baru. Nasionalisme Indonesia baru berumur satu abad. Organisasi pertama kali yang menggunakan konsep ini adalah Partai Komunis Indonesia pada 1920 (Anderson, 1999). Sebelum kemerdekaan Indonesia, di wilayah kepulauan Indonesia (menempati wilayah yang sesuai dengan bekas wilayah Hindia-Belanda) terdapat tiga bentuk organisasi politik, yaitu (1) Kerajaan-kerajaan Indonesia dan daerah taklukannya yang belum menerima kekuasaan Belanda; (2) Hindia-Belanda, meliputi daerah-daerah yang diperintah langsung serta kerajaan-kerajaan yang mengakui Belanda; dan (3) daerah kekuasaan Portugis dan Inggris (Ali, 1995).

Membayangkan kemenangan sebuah penduduk lokal melawan kekuatan asing akan memberikan alternatif lain bagi narasi sejarah Indonesia. Untuk itu sekiranya kita musti menggunakan pendekatan kausalitas. Dalam kausalitas, ada dua hal, yaitu kasus (peristiwa)

dan perubahan. Keduanya berbeda dalam sebab akibat (*consequence*) yang ditimbulkan; kasus bersifat proseual tanpa perubahan sedangkan dalam perubahan terjadi perubahan kualitas, yaitu perubahan struktural (*structural change*) dan perubahan sistem (*system change*) (Kuntowijoyo, 2008). Dalam studi struktur maupun sistem, kausalitas dapat merupakan proses yang cepat atau proses yang lama dan berkelanjutan (Kuntowijoyo, 2008). Dalam artikel ini dirumuskan penyebab yaitu kemenangan masyarakat lokal di Nusantara melawan Pemerintah Kolonial Belanda. Sedangkan akibatnya adalah mengenai struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Cerita itu bisa saja terjalin seperti ini; Aceh hingga paruh pertama abad ke-19 merupakan sebuah negara merdeka. Kerajaan ini telah menjalin hubungan dengan negara-negara yang ada pada waktu itu. Segera setelah memenangkan perang melawan Belanda kerajaan ini akan memulihkan diri dan memperkuat armada lautnya. Setelah itu, ia akan memiliki dominasi untuk memaksa kapal-kapal yang telah atau akan melintasi Selat Malaka untuk singgah di pelabuhan-pelabuhannya –persis seperti apa yang dilakukan oleh Sriwijaya hampir seribu tahun sebelumnya. Dengan begitu jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang ramai akan menghadirkan kesejahteraan bagi negara itu.

Atau, jika yang menang itu adalah Minang, maka sistem polis berbentuk nagari akan bertahan singkat karena mereka menyadari sistem seperti itu sangat rentan diganggu kekuatan asing yang sangat kuat yaitu Hindia-Belanda. Maka, para elit-elit Minang akan mencoba untuk mereformasi tata negara dengan cara menjalin persatuan dari nagari-nagari yang ada. Maka, akan terjadi transformasi dari sistem-sistem polis menjadi sebuah bentuk pemerintah modern berbentuk seperti federasi atau republik federal. Situasi alam yang menguntungkan untuk diselenggarakannya pertanian akan menghasilkan surplus hasil-hasil alam. Kopi, lada, kayu manis menjadi komoditi impor yang diperdagangkan kepada Hindia-Belanda atau ke Singapura. Ditambah dengan begitu banyaknya sawah terhampar juga akan menghadirkan surplus beras. Maka, Minangkabau akan menjadi mitra Hindia-Belanda dalam memasok bahan pangan ke wilayah pantai timur Sumatera. Bahkan jika spekulasi ini dikembangkan lebih jauh lagi, perjalanan pergerakan kemerdekaan Indonesia tentu akan sangat berbeda mengingat dengan begitu banyaknya tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berasal dari Minangkabau.

Hal yang lebih menarik jika merangkai cerita Bali. Meskipun perdagangan budak masih dilaksanakan di negara itu, tetapi elit-elit Bali dengan cepat akan menyadari bahwa alam mereka akan menjadi tempat yang menarik untuk dijadikan pariwisata. Orang-orang Eropa

yang ada di Hindia-Belanda membutuhkan tempat untuk berlibur. Segera setelah perdamaian dilangsungkan dengan Hindia-Belanda, Bali membuka daerahnya untuk bebas dikunjungi orang-orang Eropa untuk berlibur. Luka akibat peperangan yang terjadi akan terobati dan dengan pelestarian budaya Bali yang dikombinasikan dengan turisme (Picard, 1986; Vickers, 1989). Dengan banyaknya orang-orang Eropa yang berlalu-lalang di Bali secara tidak langsung akan membawa modernisasi bagi negara itu. Tetapi sisi lain dari jalinan cerita itu, tidak akan tertanam dalam diri masyarakat yang menang itu mengenai konsepsi nasionalisme Indonesia. Nasionalisme yang ada adalah nasionalisme terhadap bangsa mereka masing-masing. Orang Aceh hanya akan merasa memiliki Aceh, seperti itu juga dengan orang Minang dan Bali. Mereka tidak akan memiliki perasaan yang sama tentang masa lalu, hari ini, dan masa depan yang sama dengan daerah-daerah lainnya. Ketika sumpah pemuda diikrarkan, dalam versi ini, mungkin saja tidak akan ada perwakilan pemuda-pemuda dari Aceh, Minangkabau dan Bali yang akan menghadirinya. Bangsa Indonesia akan tidak mengenal Aceh, Minang atau Bali sebagai saudara mereka. Nasionalisme Indonesia mungkin saja tidak akan mengundang salah satu dari bangsa yang menang itu dalam proyek bersama

Diskusi mengenai *counterfactual* akan memunculkan berbagai spekulasi yang sangat terbuka untuk diperdebatkan, mengingat sejarah adalah sebuah alat untuk menjelajahi waktu dalam narasi-narasi, maka konsep kausalitas akan memainkan peran yang sangat signifikan dalam merumuskan kronologi dan analisis. Satu saja peristiwa memiliki andil dalam sejarah. Jika suatu hal saja terjadi di masa lalu berubah mengakibatkan perubahan yang tidak terhitung. Sebuah pertemuan, kesalahan, kecelakaan dapat mengubah masa lalu secara signifikan sebuah kota, negara bahkan dunia. Pada satu sisi, perjalanan sejarah yang benar-benar terjadi kadang membuat kita tidak puas. Kita sering membayangkan kenapa seperti ini dan seperti itu. Namun, pada sisi lain sesuatu yang tak pernah terjadi itu bisa menjadi refleksi atas realitas yang kita temukan pada hari ini. NKRI adalah buah dari kekalahan penduduk lokal pada masa lalu melawan kekuatan kolonialisme asing yang dipupuk dalam Hindia-Belanda dan dibumbui dengan kedatangan Jepang yang semakin menumbuhkan perasaan nasionalisme itu sendiri.

Kesimpulan

Counterfactual history adalah pendekatan untuk memahami peristiwa sejarah dengan lebih menyeluruh. Dengan pendekatan ini, akan memberikan pemahaman mengapa suatu hal bisa terjadi dan tidak terjadi serta menghasilkan koreksi-koreksi atas apa yang benar-benar terjadi. Dalam kaitannya dengan kebangsaan Indonesia, kedatangan kekuatan Eropa –terutama Belanda, dan penaklukan mereka terhadap di Nusantara akhirnya menyatukan wilayah-wilayah yang saling terpecah itu.

Dengan kata lain, kemenangan Belanda dan kekalahan penduduk lokal menegaskan keberadaan Hindia-Belanda dan setelah pendudukan Jepang berevolusi menjadi Republik Indonesia. Wilayah republik baru ini adalah bekas wilayah Hindia-Belanda. Tetapi seandainya salah satu entitas politik lokal berhasil memenangkan peperangan melawan Belanda dan tetap merdeka sepenuhnya, belum tentu mereka, ketika penciptaan negara-bangsa Indonesia pada 1940-an mau berintegrasi ke dalam republik baru itu. Hal itu akan membuat wajah Indonesia dalam versi itu akan berbeda dengan apa yang dikenal pada masa modern ini.

Daftar Pustaka

- Ali, M. 1995. Beberapa Masalah Tentang Historiografi Indonesia. In Soedjatmoko, M. Ali, G. J. Ressink, & M. Kahin (Eds.), *Dalam Historiografi Indonesia; Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anderson, B. 1999. Indonesian Nationalism Today and in the Future. *Indonesia*, 67.
- Anderson, B. 2001. *Imagined Communities; Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press.
- Black, J., & MacRaid, D. M. 2000. *Studying History*. London: MacMillan Press Ltd.
- Dobbin, C. 2008. *Gejolak Ekonomi Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Hadler, J. 2008. A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History. *The Journal of Asian Studies*, (Agustus)(No 3).
- Kahin, G. M. 1995. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Indonesia; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Kartodirjo, S. 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emprom Sampai Imperium Jilid 1*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mestika Zed. 2017. Warisan Penjajahan Belanda di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan dan Kesenambungan). *Diakronika*, 17(1), 90–103.
- Muljana, S. 2012. *Kesadaran nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, jilid I*. Yogyakarta: LKiS.
- Narny, Y. 2011. The Unity of Indonesia. *Historia: International Journal of History Education*, Vol. XII(No.1).
- Nasution. 2018. The Process of Indonesian Nation State Formation, 1901-1998. *Paramita: Historical Studies Journal*, 28(2).
- Picard, M. 1986. Cultural Tourism in Bali: Cultural Performances as Tourist Attraction. *International Workshop on Indonesian Studies, Bali-Nese State and Society: Historical, Textual and Anthropological Approache*. Leiden.
- Purwanto, B. 2001. Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis Terhadap Historiografi Indonesiasentris. *Humaniora*, Vol. XIII(No. 1).
- Reid, A. 2005. *Asal usul Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ressink, G. J. 2012. *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Samin, S. M. 2015. Kerajaan dan Kesultanan Dunia Melayu: Kasus Sumatra dan Semenanjung Malaysia. *Criksetra; Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4(No. 1).
- Sulistiyono, S. T. 2018. Nasionalisme, Negara-Bangsa, dan Integrasi Nasional Indonesia: Masih Perlukah? *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3(No. 1).
- Vickers, A. 1989. *Bali; A Paradise Creature*. Ringwood: Penguin.